



DUKUNG PROYEK PEMBANGUNAN PSEL Pemda DIY Siapkan Lahan 5,7 Hektare di Piyungan

YOGYA (MERAPI) - Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY, Kusno Wibowo menjelaskan, lokasi pembangunan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) akan memanfaatkan lahan eks KPBU seluas 5,7 hektare di kawasan Piyungan, Bantul, yang merupakan aset milik Pemda DIY.

Proyek ini diperkirakan membutuhkan waktu pembangunan sekitar 18 bulan dan ditargetkan dapat beroperasi pada pertengahan atau akhir tahun 2027. "Selama masa pembangunan, seluruh TPS di kabupaten dan kota tetap beroperasi. Kami juga akan mengevaluasi TPS mana yang dapat dilanjutkan dan mana yang perlu penyesuaian, terutama yang sering terkendala masalah sosial seperti bau," katanya, Selasa (21/10).

Menurutnya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X ingin mengetahui langsung pengolahan sampah yang selama ini sudah dijalankan kabupaten dan kota. "Beliau juga memberikan arahan agar kinerja setiap TPS dapat ditingkatkan, baik dari sisi SDM maupun kapasitas peralatan," jelas Kusno.

Sebelum kunjungan lapangan, Gubernur DIY ter-

lebih dahulu menggelar rapat koordinasi dengan bupati dan wali kota se-DIY. Hasil rapat menunjukkan adanya komitmen dan dukungan penuh dari seluruh kepala daerah terhadap pengembangan proyek PSEL di DIY.

Sri Sultan juga mengajak seluruh kabupaten dan kota di DIY untuk bersinergi dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan sampah dan pengembangan proyek PSEL. Ajakan tersebut disampaikan Sri Sultan saat meninjau tiga lokasi pengolahan sampah di DIY, Selasa (21/10), sebagai bahan pertimbangan bersama dalam pelaksanaan program PSEL yang digagas Kementerian Lingkungan Hidup.

Kunjungan ini merupakan bagian dari langkah koordinasi antara Pemda DIY dan pemerintah kabupaten/kota se-DIY untuk memastikan kesiapan daerah dalam men-

dukung proyek nasional tersebut. Sri Sultan meninjau tiga lokasi pengelolaan sampah, yakni TPS3R Nitikan 2 di Kota Yogyakarta, ITF Bawuran di Kabupaten Bantul, dan TPST Tamanmartani di Kabupaten Sleman.

"Kami berembung bersama bupati dan wali kota untuk menyamakan visi. Sampah ini harus dilihat sebagai peluang investasi. Sekarang kami sedang mempertimbangkan apakah akan mengelola sendiri atau menyerahkan ke pemerintah pusat untuk ditangani," ujar Sri Sultan.

Sri Sultan menegaskan, meskipun program PSEL nantinya dibiayai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab besar dalam penyediaan sarana pendukung seperti armada pengangkut sampah dan infrastruktur penunjang lainnya. Ia menjelaskan, agar proyek ini berjalan optimal, dibutuhkan pasokan minimal 1.000 ton sampah per hari. "Meskipun nantinya dikelola pusat, Pemda DIY tetap bertanggung jawab menyiapkan fasilitas pendukung, termasuk truk pengangkut. Prinsipnya, kami ingin keputusan diambil dengan jelas agar tidak salah langkah," imbuhnya. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005